

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP KETIDAKPASTIAN HUKUM
DALAM PENENTUAN WAKTU PEMILIHAN SUARA ULANG PASCA
PUTUSAN MK NOMOR 126/PUU-XXII/2024**

SKRIPSI

**Diajukan Oleh :
Amanta Tiara Farahita
NIM. 05020422024**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Syariah Dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara
Jurusan Hukum Publik Islam
Surabaya
2026**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amanta Tiara Farahita
NIM : 05020422024
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul : Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Ketidakpastian Hukum
Dalam Penentuan Waktu Pemilihan Suara Ulang Pasca
Putusan Mk Nomor 126/PUU-XXII/2024

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 09 Februari 2026

Yang menyatakan,



Amanta Tiara Farahita

NIM. 05020422024

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Amanta Tiara Farahita

NIM : 05020422024

Judul : Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Ketidakpastian Hukum Dalam Penentuan Waktu Pemilihan Suara Ulang Pasca Putusan Mk Nomor 126/PUU-XXII/2024

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang munaqasah skripsi.

Surabaya, 09 Agustus 2026

Pembimbing,



Elva Imeldatur Rohmah, M.H.

NIP. 199204022020122018

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Amanta Tiara Farahita

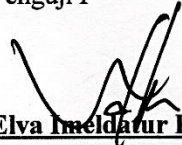
NIM. : 05020422024

Judul : Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Ketidakpastian Hukum Dalam Penentuan Waktu Pemilihan Suara Ulang Pasca Putusan MK Nomor 126/PUU-XXII/2024

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Jumat tanggal 27 Februari 2026, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

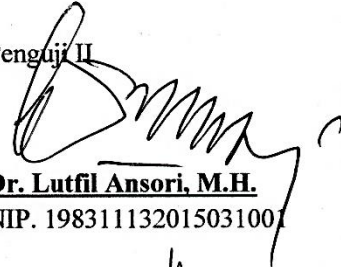
Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



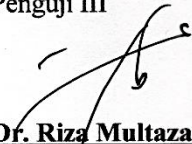
Elva Imeldatur Rohmah, S.H.I, M.H
NIP. 199204022020122018

Penguji II



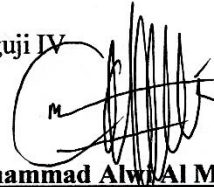
Dr. Lutfil Ansori, M.H.
NIP. 198311132015031001

Penguji III



Dr. Riza Multazam Luthfy, M.H.
NIP. 198611092019031008

Penguji IV



Muhammad Alwi Al Maliki, M.A.
NIP. 199612262025051002

Surabaya, 6 April 2026

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Amanta Tiara Farahita
NIM : 05020422024
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Publik Islam / Prodi Hukum Tata Negara
E-mail address : amantafarahita@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Ketidakpastian Hukum Dalam Penentuan Waktu Pemilihan Suara Ulang
Pasca Putusan MK Nomor 126/PUU-XXII/2024

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya,

Surabaya, 7 April 2026

Amanta Tiara Farahita

(Amanta Tiara Farahita)

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXII/2024 memberikan tafsir konstitusional terhadap frasa “tahun berikutnya” dalam Pasal 54D ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dengan menetapkan batas waktu maksimal satu tahun dalam pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang (PSU). Meskipun secara normatif putusan tersebut telah memberikan kepastian hukum mengenai batas waktu, belum adanya pengaturan teknis-operasional yang rinci dalam regulasi pelaksana berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi dalam praktik. Kondisi ini dapat berdampak pada efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta legitimasi demokrasi. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengkaji: (1) Bagaimana penentuan waktu pemilihan suara ulang pasca Putusan MK Nomor 126/PUU-XXII/2024, dan (2) Bagaimana *fiqh siyāsah* memandang ketidakpastian hukum dalam penentuan waktu pemilihan suara ulang.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXII/2024, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan karya ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan hukum positif, teori kepastian hukum, serta prinsip-prinsip *fiqh siyāsah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MK Nomor 126/PUU-XXII/2024 telah memberikan kepastian hukum secara normatif melalui penetapan batas waktu maksimal satu tahun. Namun, ketiadaan pengaturan teknis-operasional dalam regulasi pelaksana masih menyisakan potensi ketidakpastian dalam implementasi administratif. Dalam perspektif *fiqh siyāsah dustūriyyah*, kepastian waktu pelaksanaan PSU merupakan bagian dari prinsip *al-‘adl* (keadilan) dan *al-maṣlahah al-‘āmmah* (kemaslahatan umum), karena ketidakjelasan pengaturan menimbulkan mafsadah berupa instabilitas politik dan melemahnya legitimasi kekuasaan.

Penelitian ini menyarankan perlunya penguatan dan harmonisasi regulasi pemilihan kepala daerah yang secara tegas mengatur batas waktu pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang guna menjamin kepastian hukum. Selain itu, prinsip-prinsip *fiqh siyāsah* perlu dijadikan landasan etis dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemilu agar penyelenggaraan PSU tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil, pasti, dan berorientasi pada kemaslahatan umum.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	11
F. Penelitian Terdahulu	12
G. Landasan Teori.....	17
H. Definisi Operasional.....	21
I. Metode Penelitian.....	23
J. Sistematika Pembahasan	26
BAB II KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL	28
A. Teori Kepastian Hukum	28
B. Pemungutan Suara Ulang (PSU).....	38
C. <i>Fiqh Siyāsah</i>	41

BAB III PENENTUAN WAKTU PEMILIHAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MK NOMOR 126/PUU-XXII/2024.....	55
A. Latar Belakang Dan Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXII/2024.....	55
B. Penentuan Waktu Pemilihan Suara Ulang (PSU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXII/2024	58
C. Kebutuhan Pengaturan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXII/2024	70
BAB IV PERSPEKTIF <i>FIQH SIYĀSAH</i> TERHADAP KETIDAKPASTIAN HUKUM DALAM PENENTUAN WAKTU PEMILIHAN SUARA ULANG	77
A. Landasan <i>Fiqh Siyāsah Dustūriyah</i> Dalam Sistem Ketatanegaraan Islam	77
B. Tinjauan <i>Fiqh Siyāsah Dustūriyah</i> Terkait Ketidakpastian Hukum Dalam Penentuan Waktu Pemilihan Suara Ulang.....	82
BAB V PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA.....	97
LAMPIRAN.....	104
BIOGRAFI PENULIS	111

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Kamma, Hamzah, Mahrida, and Moh. Mujibur Rohman. *Fiqh Siyasah (Simpul Politik Islam Dalam Membentuk Negara Madani)*. PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA, 2023.
- Māwardī, ‘Alī ibn Muḥammad. *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*. Jakarta: Darul Falah, 2006.
- Nasrullah, Achmad Muzammil Alfian. *Fiqh Siyasah Konsep, Teori, Dan Sejarah Perkembangan Pemikiran Politik Islam Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Literasi Nusantara Abadi, 2023.
- Rahardjo, Satjipto. *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia Dan Hukum*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007.
- Taimiyah, Ibnu. *Siyasah Syar’iyah: Etika Politik Islam*. Surabaya, Indonesia: Risalah Gusti, 1995 (Rep. 1999), 2004.
- Tutik, Titik Triwulan. *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Pertama. Prenadamedia Group, 2017.
- Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Cetakan I. Publika Global Media, 2024.

Jurnal/Skripsi

- Aissy, Gita Raudhah Rahadatul, Jubilla Hafitri, Muliassa Insani Candra, and Qurratu Aini Aprilia. “Tanggung Jawab dan Akuntabilitas Penyelenggara Pemilu dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Serang.” *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4, no. 3 (October 2025): 7341–7350. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.3102>.
- Amir, Akmal Adzharuz Dzaki, Sandi Prayoga, and Aadil Ahmad Shairgojri. “The Contemporary Politics of Welfare and Anxiety: A Fiqh Siyasah Review of Indonesia’s 2045 Vision.” *Nusantara: Journal of Law Studies* 4 (July 2025). <https://doi.org/10.5281/ZENODO.17353871>.
- Andrianto, Fadly. “Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia.” *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 1 (April 2020): 114–123. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.114-123>.
- Arifin, Firdaus. “Mengintegrasikan Hukum Pemilu: Harmonisasi Peraturan KPU Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan

- Kepala Daerah.” *Rio Law Jurnal* 6, no. 1 (2025).
<https://doi.org/10.36355/rlj.v6i1.1528>.
- Aulia, M. Zulfa. “Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo.” *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (June 2018): 159–185. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>.
- Bhakti, Teguh Satya. “Kepastian Hukum dalam Pengujian Formil Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia terkait Inkonsistensi Putusan, Batas Waktu Pengujian, dan Implikasi Pembatalan Undang- Undang.” *JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION* 6, no. 4 (2025).
<https://doi.org/10.55681/jige.v6i4.4693>.
- Bimasakti, M. Adiguna. “Legal Protection Against Legal Uncertainty of Tacit Approval Under Indonesian Job Creation Law.” *SEAJ-ALGov* 1, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.22146/seajalgov.v1i1.9922>.
- Fauzan, Muhammad, Bobang Noorisnan Pelita, and Lutfi Fahrul Rizal. *Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemungutan Suara Ulang Pilkada Serentak 2024 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 Di Kabupaten Tasikmalaya Perspektif Siyasah Dusturiyah*. 6, no. 2 (2025).
<https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i2.1476>.
- Firdaus, Muhammad Bintang. “Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch pada Hukum Indonesia.” *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 3, no. 1 (2025).
<https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp>.
- Flassy, Marlina, Usman Idris, and M. Zaenul Muttaqin. “Implementing Constitutional Court Decisions: Case Study of the Revision of the 2024 Regional Head Election Law in Indonesia.” *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 10, no. 1 (March 2025): 435–448.
<https://doi.org/10.22373/petita.v10i1.732>.
- Hafi, Akhmad, Noormala Santi, and Akhmad Zaki Yamani. “Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan Vol. 2, No. 2, Hal 211-220.” *Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan* 2, no. 2 (Nopember 2025).
<https://www.jurnal.pustari.com/index.php/ahsan/article/view/66/58>.
- Hakim, Ahmad Burhan, and Satryo Pringgo Sejati. “Demokrasi Dan Politik Islam Dalam Pesrspektif Siyasah Dusturiyah.” *HOKI : Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.55352/hki.v2i1.852>.
- Halilah, Siti, and Mhd Fakhurrahman Arif. “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli.” *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. II (December 2021).
<https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334>.

- Handayani, Retno Sari. "Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Indonesia." *PERSPEKTIF* 9, no. 1 (January 2020): 9–18. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v9i1.2828>.
- Hibar, Ujang, Wahyudi, Asnawi, and Eli Apud Saepudin. "Juridical Review of the Decision of the Constitutional Court Number 70/PHPU.BUP-XXIII/2025 Re-Voting of the Serang Regency Election." *Legal Brief* 14, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.35335/legal.v14i1.1264>.
- Idrus, Achmad Musyahid. "Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih: Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 10, no. 2 (December 2021): 123–37. <https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.26278>.
- Itok Dwi Kurniawan, and Souad Ezzouali. "Revisiting the Principle of Legal Certainty: A Contemporary Analysis through the Lens of Legal Positivism." *Nusantara: Journal of Law Studies* 3, no. 2 (December 2024). <https://doi.org/10.5281/ZENODO.17385496>.
- Kadri, Wahijul, and Nurul Hidayah Tumadi. "Siyasah Syarīyah & Fiqih Siyasah." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 5, no. II (December 2022). <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/468/380>.
- Kamizi, Fajar, Sarkowi, Marzuki, and Dodi Irawan. "Konsep Kekuasaan Dalam Siyasah Dusturiyah Dan Relevansinya Terhadap Prinsip Kedaulatan Rakyat di Indonesia." *Elqonun: Jurnal Hukum Ketatanegaraan* 3, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.19109/elqonun.v3i1.31043>.
- Kirana, Devina Khozila, M. Osama Ergi Setiawan, and Shello Priza. "Demokrasi Indonesia Dalam Kapasitas Pemilu Yang Luber Jurdil." *Journal Of Law And Social Society* 1, no. 1 (June 2024): 11–26. <https://doi.org/10.70656/jolasos.v1i1.80>.
- Kurniawaty, Cecillia, Lastuti Abubakar, and Mohamad Akyas. "Kepastian Hukum Penundaan Pembayaran Bphtb Dalam Ayda Lelang Dalam Perspektif Hukum Perbankan Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah." *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an* 6, no. 1 (December 2022): 15–32. <https://doi.org/10.23920/acta.v6i1.912>.
- Maarif, Ihsanul. "Penapisan Materi Muatan Perundang-undangan Sebuah Pendekatan Sistematis: Keseimbangan antara Norma Primer dan Pengaturan Teknis." *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 1 (November 2024). <https://doi.org/10.38035/jihhp>.
- Maulana, Endang, Mas Iman Kusnandar, and Firdaus. "Dynamics Of Considerations In The Constitutional Court's Decision In Deciding On The

- Settlement Of Disputes In The 2024 General Election Of Regional Heads And Deputy Regional Heads Of Serang Regency.” *Dharmawangsa: International Journals of The Social Science, Education and Humanities 6* (November 2025).
<https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/dharmawangsa/article/view/7273/pdf>.
- Muhaki. “Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Perspektif SiyasaH DustuRiyah.” *JOSSE: Journal Of Social Science And Economics 2*, no. 2 (October 2023).
<https://doi.org/10.37812/josse.v2i2.1509>.
- Muthalib, Salman Abdul, and Muhammad Faizur Ridha bin Mohd Pauzi. “Siyasah Dusturiyyah Sebagai Sistem Perpolitikan Dalam Al-Qur’an.” *Tafse: Journal of Qur’anic Studies 4*, no. 2 (2019). <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/tafse>.
- Nopiyanti, Rosi, and Ahmad Fitra Yuza. *Kapasitas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Dalam Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. 2* (2025).
<https://doi.org/10.25299/JMP.2025.21483>.
- Novemyanto, Alfin Dwi. “Rekonstruksi Kewenangan Bawaslu Terhadap Pelanggaran Administratif Pilkada (Studi Putusan Mk No. 104/Puu-Xxiii/2025).” *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan 11*, no. 4 (November 2025). <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat>.
- Nugraha, Muhammad Saifuddin Eka, and Fatma Ulfatun Najicha. “Kontribusi Ideologi Pancasila Dalam Proses Pemilihan Umum Di Indonesia.” *urnal Rontal Keilmuan PKn 1*, no. 1 (November 2023): 1–10.
- Nurjamal, Ecep, Opik Hidayat, and Aep Saepudin. “Politik hukum dan SiyasaH Syar’iyyah: Tafsir Al-Qur’an sebagai landasan reformasi KUHP menuju keadilan hukum di Indonesia.” *VIVENDUM: Vision of Islamic Values Dynamics Journal 1*, no. 1 (2025).
- Pandia, Mutia Pebi. *Pemungutan Suara Ulang Pemilu Tahun 2024 di Desa Tenggak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen. 14*, no. 1 (2024).
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/48916/32986>.
- Pradiva, Indi Yustisia. “Legal Reasoning Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Mengatur Batas Waktu Pemungutan Suara Ulang Perspektif Demokrasi (Studi Putusan Nomor 126/PUU-XXII/2024).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri, 2025.
<https://repository.uinsaizu.ac.id/id/eprint/33144>.
- Pratama, Aan. “Konsep Pemikiran Hukum Islam Dalam Bidang SiyasaH.” *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner 01*, no. 03 (2025): 1075–1087.

- Pratama, Maulana Hafidz, Andre Kurniawan, and M. Nabil Alifah. "Relanvansi Konsep Al- Mashlahah Dalam Pembentukan Kebijakan Publik." *Tabayyun : Journal Of Islamic Studies* 2, no. 2 (2024). <https://journal.tabayanu.com/index.php/tabayyun/article/view/69/39>.
- Puteri, Fania Aisyah, and Nur Hidayat Sardini. "Malapraktik Oleh Penyelenggara Pemilu: Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018 Dalam Perspektif Tata Kelola Pemerintahan." *Journal of Politic and Government Studies* 12, no. 2 (2023). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/38464>.
- Putra, Ilhamdi, and Beni Kharisma Arrasuli. "Uncertainty of Procedural Law Practices and Variation in Decisions of Judicial Review of Legislative Process." *JURNAL KONSTITUS* 22, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.31078/jk2228>.
- Ridhanie, Azhar. "Politik Hukum Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2025." *Anterior Jurnal* 24, no. III (2025). <https://doi.org/10.33084/anterior.v24i3.10827>.
- Rizman, Iksir Alkholy, Saipul Umami, and Riki Andika Putra. *Penerapan Prinsip Fiqih Siyasa dalam Kepemimpinan Modern: Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer*. 1, no. 1 (2025). <https://ejournal.risetanakbangsa.id/jhs/article/view/6>.
- Rizqi, M., and Didan Neofal Arysandi. "Problematika Aturan Pemungutan Suara Ulang dalam Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden." *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, no. 3 (January 2025): 1225–34. <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.3.10617.1225-1234>.
- Roza, Darmini. "Teori Positivisme Hans Kelsen Mempengaruhi Perkembangan Hukum Di Indonesia." *Lex Jurnalica* 18, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.47007/lj.v18i1.4056>.
- Saputra, Almahdi, Dian Bakti Setiawan, and Anton Rosari. *Politik Hukum Pengaturan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sumatera Barat*. 18, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.31849/niara.v18i1.25401>.
- Sibarani, Bertoni, Hedwig Adiando Mau, and Mardi Chandra. "Kepastian Hukum Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Pada Tahapan Pemungutan Suara Ulang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum." *Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum* 2, no. 3 (June 2025): 120–27. <https://doi.org/10.60126/sainmikum.v2i3.958>.

- Sutisna, Sutisna, Evan Edo Prasetya, and Yono Yono. "Kepemimpinan Non-Muslim Dalam Perspektif Imam Al-Mawardi (kajian Literatur Kitab Al-Ahkam as-Sulthaniyyah)." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 19, no. 1 (July 2021): 43–56. <https://doi.org/10.35905/diktum.v19i1.1984>.
- Syahputra, Yusuf. "Fiqh siyasah; tinjauan tentang pemikiran politik hukum tata negara dalam perspektif islam." *Maliki Interdisciplinary Journal* 3 (2025).
- Syakdiah, Halimatus. "Negara dalam Islam: Analisis Teoretis terhadap Tujuan dan Kewajiban Negara Menurut Al-Mawardi dan Abu Yusuf." *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 10, no. 2 (October 2025): 155–64. <https://doi.org/10.53429/iljs.v10i2.1576>.
- Wulandari, Amanda. "Tinjauan Hukum Positif Dan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Barat Tahun 2024." Skripsi, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus, 2025. <https://repo.uinmybatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/31912>.
- Yamani, Akhmad Zaki. "Pemilu Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Siyasah: Menjembatani Nilai-Nilai Islam Dan Sistem Demokrasi." *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 9 (2025). <https://cibangsa.com/index.php/triwikrama/article/view/2095/1824>.
- Yulianto, Ado Dwi. "Pemungutan Suara Ulang Calon Anggota DPRD Dalam Pemilu Serentak Perspektif Demokrasi (Studi Putusan MK Nomor 158-02-16-37/PHPU. DPR-DPRD-XXII/2024)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri, 2025. <https://repository.uinsaizu.ac.id/29999>.
- Yulida, Devi, and Rina Talisa. "The Executory Authority of Constitutional Court Decisions in the 2024 Local Head Election." *Acta Law Journal* 3, no. 1 (December 2024): 25–36. <https://doi.org/10.32734/alj.v3i1.18967>.
- Yunita, Putri, and Siti Tiara Maulia. "Pemilihan Umum Sebagai Bentuk Perwujudan Demokrasi di Indonesia." *Journal of Practice Learning and Educational Development* 4, no. 2 (June 2024): 137–42. <https://doi.org/10.58737/jpled.v4i2.288>.
- Z, Rijal Mummazziq. "Ijtihad Politik Imam Al-Mawardi dan Pengaruhnya dalam Fiqh Siyasah (Ulasan atas Kitab Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa Wilayah al-Diniyyah)." *Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 01 (September 2023): 35–42. <https://doi.org/10.62097/mabahits.v4i01.1435>.
- Zaini, Muhammad Fahru, and Seva Maya Sari. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Keputusan Walikota Medan No. 800/613k tentang Pemberhentian Aparatur Sipil Negara." *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu*

Sosial 9, no. 1 (July 2025): 406–13.
<https://doi.org/10.30743/mkd.v9i1.11416>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017.

Putusan Pengadilan

Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126-PUU-XXII-2024.

Berita

Anggi Muliawati. “MK: Pilkada Ulang Jika Menang Kotak Kosong Digelar Paling Lambat November 2025.” *detiknews*, November 14, 2024. <https://news.detik.com/pilkada/d-7637842/mk-pilkada-ulang-jika-menang-kotak-kosong-digelar-paling-lambat-november-2025>

Antara. “Komisi II DPR Sepakat Pilkada Ulang Digelar September 2025, Begini Pertimbangan KPU.” *Tempo*, September 26, 2024. <https://www.tempo.co/politik/komisi-ii-dpr-sepakat-pilkada-ulang-digelar-september-2025-begini-pertimbangan-kpu-5502>.

Argawati, Utami. “Ketidakpastian Pilkada Ulang Ketika Kotak Kosong Menang.” *MKRI.ID*, November 7, 2024. <https://www.mkri.id/berita/ketidakpastian-pilkada-ulang-ketika-kotak-kosong-menang-21818>.

Deputi Polhukam. “Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Pilkada Dengan 1 (Satu) Pasangan Calon.” *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*, December 2, 2024. <https://setkab.go.id/putusan-mahkamah-konstitusi-terkait-pilkada-dengan-1-satu-pasangan-calon/>.

Dwi Rahmawati. “KPU Gelar Coblos Ulang Pilkada Di 3 Daerah 6 Agustus.” *Detiknews*, July 14, 2025. <https://news.detik.com/berita/d-8011134/kpu-gelar-coblos-ulang-pilkada-di-3-daerah-6-agustus>.

Firda Cynthia Anggrainy. “DPR-KPU Setuju Pilkada Ulang Jika Kotak Kosong Menang Di September 2025.” *Detiknews*, September 26, 2024. <https://news.detik.com/pilkada/d-7558460/dpr-kpu-setuju-pilkada-ulang-jika-kotak-kosong-menang-di-september-2025>.

Hadi, Fadjar, and Ahmad Romadoni. “MK Perintahkan Pilkada Ulang Jika Kotak Kosong Menang, Maksimal 27 November 2025.” *kumparanNews*, November 14, 2024. <https://kumparan.com/kumparannews/mk-perintahkan-pilkada-ulang-jika-kotak-kosong-menang-maksimal-27-november-2025-23ubNaX6vmS/full>.